

PENGARUH KEBIJAKAN KUOTA 95% TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

Haris Munandar

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

Email : Harismunandar964@ymail.com

ABSTRAK

Kata kunci : Sumberdaya Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sumberdaya terhadap standar pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 45 guru di SMAN 3 Pontianak. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji pearson product moment. Untuk menguji hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis korelasi *Pearson Product Moment*.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sumberdaya tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap standar pendidikan. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa r hitung sebesar 0.095 lebih kecil dibanding r tabel 0.294. dengan N berjumlah 45 responden. Berdasarkan r hitung yaitu 0.095 yang dibandingkan dengan tabel pedoman interpretasi maka kekuatan pengaruh yaitu sangat rendah. Dari perhitungan koefisien determinasi didapat sumbangan sumberdaya terhadap standar pendidikan 0.9%. Dengan demikian, maka tidak terdapat pengaruh yang positif Kebijakan kuota 95% Terhadap Standar Pendidikan di Kota Pontianak. Membuat suatu kebijakan seharusnya mempertimbangkan sumber daya yang ada baik itu finansial, kewenangan, sumber daya manusia, dan potensi yang ada secara menyeluruh agar di saat berjalanya kebijakan ini memiliki manfaat dan pengaruh yang positif terhadap standar pendidikan.

ABSTRACT

Keywords: educational resources, standardized processes, and Educational Standards

This research aims to examine and analyze the effect on the standard of education resources. The data was collected through questionnaires and conducted in 45 teachers at SMAN 3 Pontianak. Analysis of the data in this study using Pearson product moment test. To test the hypothesis of the study conducted by Pearson Product Moment correlation analysis.

The analysis shows that the resource does not have a positive effect on educational standards. From the results of hypothesis testing showed that r count for 0.095 is smaller than the table r 0.294. with N amounted to 45 respondents. Based on the count r 0.095 compared with a table of guidelines influence the interpretation of the strength is very low. From the calculation of the coefficient of determination obtained resource contribution to the standard of education 0.9%. Thus, there is no positive effect 95% quota Policy Toward Education Standards in Pontianak. Creating a policy should take into account existing resources be it financial, authority, human resources, and the potential that exists in the current overall policy that has benefits and positive impact of educational standards.

A. PENDAHULUAN

Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Standar Pendidikan Nasional itu diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi peserta didik

Salah satu usaha pemerintah kota Pontianak dalam upaya peningkatan pendidikan yaitu mengeluarkan Kebijakan kuota 95% pelajar kota bersekolah di Kota Pontianak. Kebijakan Walikota ini dibuat dimaksudkan untuk melindungi hak pelajar Kota Pontianak dan agar pemerintah daerah memajukan daerahnya masing-masing. Peraturan walikota ini dibuat semata-mata guna menjalankan amanah undang-undang yang nantinya diharapkan kebijakan ini mampu memicu Pemerintah Daerah atau luar Kota Pontianak untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan menaikkan kualitas atau standar pendidikan tiap daerah .

Melalui Peraturan Walikota No.29 tentang penerimaan siswa baru pada sekolah di Kota Pontianak. Kuota Calon Peserta Didik baru yang mendaftar ke SMA di Kota Pontianak diatur pada bab v pasal 10 sebagai berikut:

a.Siswa lulusan SMA/MTs/Sederajat penduduk Kota Pontianak mendapat kuota 95% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online.

b.Siswa lulusan SMA/MTs/Sederajat yang bukan penduduk Kota Pontianak mendapatkan kuota 5% dari daya tampung masing-masing Satuan Pendidikan Peserta PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) online.

Selain untuk melindungi pelajar kota dan mensejahterakan pelajar Kota Pontianak, kebijakan ini juga bertujuan untuk melihat program pemerintah Kota Pontianak tentang pemerataan pendidikan (Wajib Belajar 9 Tahun Menuju Wajib Belajar 12 Tahun) dapat dipantau titik sasarannya serta agar dapat mudah mengakomodir siswa tamatan SMP untuk melanjutkan pendidikan.

Dari kebijakan kuota 95% ini dapat dilihat apakah ada pengaruh dalam peningkatan yang lebih baik standar pendidikan yang ada di Kota Pontianak dibanding sebelumnya atau biasa-biasa saja dan apakah daerah lain ikut

terpacu dalam meningkatkan standar pendidikannya masing-masing. Sebagaimana yang kita ketahui di Kota Pontianak kualitas pendidikannya di atas rata-rata dibanding kota dan kabupaten lain dan tidak memiliki masalah atau problem yang begitu rumit dibanding daerah-daerah lain.

Dari uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bagi peneliti ada hal menarik untuk diteliti yang menjadi fokus penelitian, yaitu adalah "Apakah ada pengaruh yang positif antara kebijakan kuota 95% terhadap standar pendidikan di Kota Pontianak".

B. PENGARUH KEBIJAKAN KUOTA 95%(SEMBILAN PULUH LIMA PERSEN) TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan suatu kebijakan dan akan menutupi kekurangan dari kebijakan itu sendiri. Selanjutnya evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui suatu kebijakan itu berhasil atau tidak, dan merupakan salah satu tahapan dalam siklus kebijakan. Badjuri dan Yuwono (2002 : 132) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk memenuhi 3 tujuan utama, yakni :

- 1.Menguji apakah kebijakan yang di implementasikan mencapai tujuan.
- 2.Memajukan akuntabilitas pelaksanaan publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- 3.Memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan daerah menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007 : 278) yaitu

- 1.Aspek *input*, fokus penilaian atau indikatornya adalah :

- a.Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai?

- b.Berapakah SDM, uang, infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?

- 2.Aspek *proses*, fokus penilaian atau indikatornya adalah :

- a.Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?

b. Bagaimanakah efektivitas dan efisiensi metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut?

3. Aspek *output*, fokus penilaian atau indikatornya adalah :

a. Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik?

b. Berapa orang yang berhasil mengikuti program atau kebijakan tersebut?

4. Aspek *outcomes*, fokus penilaian atau indikatornya adalah :

a. Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?

b. Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan?

b. Adakah dampak negatifnya? Seberapa dampak negatif tersebut?

Dari keempat aspek indikator penilaian evaluasi yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yuwono, penulis menggunakan aspek *input* (sumber daya) yang fokus penilaiannya adalah dampak (Standar Pendidikan) dari suatu kebijakan, dengan demikian hasil dari evaluasi akan lebih fokus pada permasalahan dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian

Definisi Variabel Sumberdaya dan Standar Pendidikan

Pendidikan yang bermutu merupakan prasyarat yang diutamakan dalam mengembangkan Sumberdaya yang berkualitas terhadap standar pendidikan yang ada. Disini peneliti melihat apakah ada pengaruh sumberdaya (Finansial, Kewenangan, sumber daya manusia, Potensi) terhadap standar pendidikan yang pada tulisan ini difokuskan pada standar proses (pembelajaran dan pengawasan) untuk lebih jelas peneliti menjabarkan secara lebih mendalam kedua variabel tersebut dibawah ini :

A. Sumber daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi kebijakan dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi sumber daya finansial, kewenangan, sumber daya manusia, dan potensi untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat

dipakai untuk melakukan kegiatan kebijakan seperti dana dan sarana prasarana.

a. Sumberdaya Finansial

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti bangunan sekolah, kursi, meja, peralatan, serta dana yang mencukupi, tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Pentingnya sumberdaya finansial yang mencukupi dengan baik diharapkan berdampak dengan berjalannya kebijakan dengan baik pula.

b. Kewenangan

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana kebijakan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor, Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil kebijakan dapat berjalan

c. Sumberdaya Manusia

Selain itu, sumber daya manusia juga berpengaruh sebagai penggerak kebijakan dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber Daya Manusia adalah seseorang atau sekelompok manusia yang menjalankan atau terkena dampak dari kebijakan tersebut, merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) didalam kebijakan yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi atau kebijakan.

d. Potensi

Potensi merupakan hal yang sangat penting dimana selama berlangsungnya kebijakan tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan masalah baru dari kebijakan yang dibuat tersebut. Potensi yang dapat dihasilkan dari suatu kebijakan dapat berupa positif dan negatif.

B. Standar Proses

Pemerintah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan Indonesia yang menjadi pedoman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam penelitian ini peneliti membatasi hanya pada standar proses

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

b. Pengawasan

"pengawasan" ialah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Dalam dunia pendidikan istilah "pengawasan" lebih cenderung dikonotasikan dengan istilah "pengawasan" dalam hal ini cenderung mengarah kepada peran seorang manajer dalam kegiatan manajemen, atau yang dikenal dengan istilah controlling. Dalam konteks manajemen, kegiatan pengawasan dilakukan oleh seorang manajer dalam rangka mengendalikan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) yang telah diformat dalam suatu program. Dari sini nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penilaian dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai

C. METODE PENELITIAN

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Berdasarkan tujuan penelitiannya, Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi. Penelitian eksplanasi adalah menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun, 1987:3). Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah seluruh guru SMAN 3 Kota Pontianak yang berjumlah 45 orang dilakukan penyebaran kuesioner oleh peneliti.

Pengolahan data tersebut harus melalui analisis data. Teknik analisis data yang akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik Korelasi Product Moment, hal ini dikarenakan data yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah jenis data rasio. Menurut Sugiyono

(2008 : 16) yakni data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak sebagaimana dijelaskan dalam penggunaan statistik parametris dan non parametris dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik memperhatikan dua hal yakni macam data dan bentuk hipotesis.

D. PENGARUH KEBIJAKAN KUOTA 95% (SEMBILAN PULUH LIMA PERSEN) TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK

1.) Pengaruh Pembelajaran Terhadap Standar Pendidikan

Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Rustaman, 2001). Dalam proses pembelajaran guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Menurut Hasibuan (1988) pola pembelajaran yang efektif adalah pola pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswa, artinya guru tidak harus selalu menjadi pihak yang lebih dominan, pada pola pembelajaran ini guru tidak boleh hanya berperan sebagai pemberi informasi tetapi juga bertugas dan bertanggung jawab sebagai pelaksana yang harus menciptakan situasi memimpin, merangsang dan menggerakkan siswa secara aktif. Selain itu guru harus dapat menimbulkan keberanian siswa baik untuk mengeluarkan idenya atau sekedar hanya untuk bertanya, hal ini disebabkan karena mengajar bukanlah hanya suatu aktivitas yang sekedar menyampaikan informasi kepada siswa, melainkan suatu proses yang menuntut perubahan peran seorang guru dari informator menjadi pengelola belajar yang bertujuan untuk membelajarkan siswa agar terlibat secara aktif sehingga terjadi perubahan-perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada umumnya.

Salah satu tujuan dari pembelajaran adalah meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru harus menyediakan peluang di dalam kelas yang mempertimbangkan prakarsa dan keterlibatan siswa lebih besar. Menurut Blosser dalam bukunya yang berjudul *Research Matters-to the Science Teacher* No.9001 Using

Question In Science Classrooms. Salah satu metode untuk merangsang siswa berkomunikasi dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran adalah dengan pertanyaan. Menurut pendapat yang dikemukakan Hasibuan (1988) dalam konteks pembelajaran dan sudut pandang teori belajar, pertanyaan merupakan suatu stimulus yang mendorong anak untuk berpikir dan belajar sehingga anak akan lebih mudah menguasai materi atau konsep yang diberikan dan kemampuan berpikir siswa akan lebih berkembang. Sejalan dengan itu sudut pandang lain juga mengatakan bahwa pertanyaan merupakan satu tindakan pedagogik guru dalam rangka mengkonstruksi pengetahuan secara bersama.

Proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik seseorang, dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Salah satu peran yang dimiliki oleh seseorang guru untuk melalui tahap-tahap ini adalah sebagai fasilitator. Untuk menjadi fasilitator yang baik guru harus berupaya dengan optimal mempersiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik, demi mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan oleh E. Mulyasa (2007), bahwa tugas guru tidak hanya menyampaikan informasi kepada peserta didik, tetapi harus menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar (*facilitate of learning*) kepada seluruh peserta didik untuk mampu menyiapkan proses pembelajarannya.

Berkenaan dengan proses pembelajaran di atas bahwa dalam dunia pendidikan pendidikan tidak hanya mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya saja, akan tetapi kemampuan afektif dan psikomotoriknya juga harus dikembangkan. Misalnya saja, pendidikan berbasis karakter sering di bicarakan akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan, merujuk pada output dari kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) nantinya para peserta didik diharapkan menjadi seseorang yang mempunyai perilaku, ciri khas sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila. Namun sebelum melangkah kesana, harus diidentifikasi terlebih dahulu permasalahan – permasalahan pendidikan yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara

Kesatuan Republik Indonesia, beberapa komponen dalam standar nasional tersebut antara lain : standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kelulusan, standar pendidikan tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Komponen – komponen tersebut secara komprehensif berjalan seiring dan seirama. Namun kenyataan di lapangan terkadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Berkaitan dengan hal di atas jika ditelaah salah satu komponen tersebut, semisal standar proses, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standarkompetensi lulusan (PP.no.19 th.2005). Berarti segala sesuatu yang menyangkut proses pembelajaran, yaitu persiapan guru dalam penyusunan RPP, penyusunan media, modul, hingga evaluasi pembelajaran untuk siswa. Harapannya siswa dapat memahami segala penjelasan dari guru tentang materi yang disampaikan. Menurut Kimble (1961) tentang definisi belajar adalah *perubahan yang relatif permanen di dalam behavoirol potentiality (potensi behavioral) yang terjadi sebagai akibat dari reinforced practice (praktek yang diperkuat)*. Artinya perubahan sikap yang signifikan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu karena adanya praktek-praktek (kegiatan pembelajaran) yang dilakukannya.

Namun konsep tentang proses pembelajaran yang ideal terkadang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, dikarenakan oleh beberapa faktor , antara lain :

1. Permasalahan kurikulum, dimana sekarang ini masih terdapat kebingungan dari guru sebagai pendidik tentang pedoman mengajar, terkadang sudah menjadi rahasia umum di kalangan para guru yaitu “ganti menteri ganti kebijakan”, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional gagal tercapai, mengapa demikian? (hal ini terjadi) karena guru merasa kebingungan dalam melaksanakan proses PBM, acuan mana yang akan dipakai, meskipun model kurikulum yang ada sekarang dirasa sempurna.
2. Permasalahan ketenagaan, dalam hal ini adalah guru atau pengajar. Guru juga menjadi salah satu faktor penentu dari bangsa, dimana para guru lah yang bertugas tidak hanya mengajar tetapi mendidik, tetapi di lapangan berbeda kenyataannya. Terkadang juga banyak sekali fenomena tenaga pengajar ini dimana ada yang hanya mencari “uang” tanpa menyadari tugas utama dari seorang pendidik. Dalam hal ini profesionalisme gurulah yang ditanyakan.

Problem solving yang coba ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang disajikan ialah

Dalam permasalahan kurikulum ini seharusnya lebih dikaji lagi, apakah model kurikulum yang berlaku sekarang relevan digunakan dalam proses belajar mengajar dalam kondisi apapun, dalam artian juga selain didasarkan kepada subyek yaitu guru, juga didasarkan obyek yaitu siswa. contohnya : disekolahan A input siswanya tingkat intelegensinya standar, dengan sekolahan B input siswanya di bawah standar, maka hipotesis yang ada nanti adalah output siswa yang diharapkan tidak dapat tercapai.

2.) Pengaruh Pengawasan Terhadap Standar Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan pengawasan mempunyai peran penting, sebab dengan adanya pengawasan dapat diketahui hasil dari pelaksanaan pekerjaan, apa sesuai dengan rencana dan standar yang sudah ditentukan atau tidak. Menurut Murdick mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimana luasnya dan rumitnya suatu organisasi. Sedang menurut faham klasik, pengawasan adalah suatu proses yang bersifat memaksa-maksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana yang sudah ditetapkan. (Nanang Fattah, Drs. 1996 :102). Pengawasan juga sebagai alat untuk memantau dan menilai perencanaan dan pelaksanaan, apa ada kesalahan dan penyimpangan, untuk kemudian dilakukan perbaikan serta mencegah supaya tidak terulang lagi kesalahan dan penyimpangan. Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa pengawasan adalah tindakan atau proses kegiatan untuk mengontrol dan menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan atau ditetapkan.

Fungsi pengawasan Pengawasan ini mempunyai berbagai fungsi pokok, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan; maksudnya bahwa pengawasan itu dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan serta penyelewengan.

b. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi; artinya dengan adanya pengawasan hendaknya dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak terus berlarut-larut, yang akhirnya dapat mengakibatkan kerugian organisasi.

c. Untuk mempertebal rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau para pekerja dalam melakukan tugas yang dibebankannya. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, dapat pula di tempuuh suatu cara, yakni kalau memang tidak bisa dihindarkan adanya penyimpangan, maka kepada setiap pihak diwajibkan untuk membuat laporan secara tertulis mengenai penyimpangan tersebut.

d. Untuk mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya ; yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap bagian organisasi selalu siap dan selalu berusaha jangan sampai terjadi kesalahan pada bagiannya atau dengan kata lain bahwa setiap bagian ada yang selalu dalam keadaan yang dinamis serta terarah dengan sisten manajemen yang mantap.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck dalam Mantja 2001). Oleh karena itu mudah dipahami bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen lainnya (Mantja 2001). Berdasarkan konsep tersebut, maka proses perencanaan yang mendahului kegiatan pengawasan harus dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksudkan mencakup perencanaan: pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas.

Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan

pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.

Pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan (Pandong, A. 2003). Dalam satu kabupaten/kota, pengawas sekolah dikoordinasikan dan dipimpin oleh seorang koordinator pengawas (Korwas) sekolah/ satuan pendidikan (Muid, 2003). Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998).

Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas sekolah dapat (dan memang tepat) dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus, administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab orang tua dan masyarakat (Law dan Glover 2000). Lebih lanjut Ofsted (2005) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah

meliputi: (1) standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau supervisor. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya. Indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum, sistem penilaian dan komponen-lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. Itulah sebabnya kehadiran pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam peningkatan mutu pendidikan, agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah lainnya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dibawah ini dapat kita lihat pembuktian hipotesis pengaruh sumberdaya pendidikan terhadap standar pendidikan:

Dari uraian diatas dapat dilakukan pembuktian hipotesis, yaitu tidak terdapat pengaruh antara sumberdaya dengan standar pendidikan. Berikut hasil uji perhitungan koefisien Korelasi Product Moment variabel sumberdaya terhadap standar pendidikan yaitu dengan hasil sebesar 0.095. Hasil perhitungan ini menegaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, yang terdiri dari variabel sumberdaya dengan standar pendidikan. Berdasarkan pengujian statistik tersebut, membuktikan bahwa pengaruh antara variabel sumberdaya terhadap standar pendidikan lemah yakni dengan korelasi 0.095. Sebagaimana dikatakan Sugiyono (2008:16), bahwa apabila r hitung

lebih besar dari r tabel berarti H_0 di tolak dan H_a diterima. Hasil uji koefisien Korelasi Product Moment variabel sumberdaya terhadap standar pendidikan menunjukkan bahwa besarnya koefisien korelasi yang didapatkan melalui Pearson Product Moment sebesar (korelasi sederhana) sebesar 0.095. Hasil perhitungan ini menegaskan bahwa tidak terdapat pengaruh yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pengujian statistik tersebut, membuktikan bahwa pengaruh antara variabel sumberdaya terhadap standar pendidikan lemah 0.095. Pada hasil uji statistik dengan hasil 0.095 bila dibandingkan dengan r tabel, nilai-nilai r product moment yakni dengan taraf kesalahan 5 % dan sampel 45 dalam hal ini maka nilai r tabelnya adalah 0.294. Hal ini menunjukkan bahwa r hitung lebih kecil dibanding r tabel ($0.095 < 0.294$).

Bila diinterpretasikan dengan pedoman interpretasi koefisien korelasi tersebut, hasil perhitungan uji statistik menunjukkan pada interval koefisien 0.00 – 0.199 yang artinya interpretasi korelasi menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel yang diteliti lemah, berdasarkan hal tersebut maka variabel sumberdaya dan standar pendidikan tidak mempunyai pengaruh yang lemah dengan variabel standar pendidikan.

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan, maka hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh antara sumberdaya dan standar pendidikan tidak dapat diterima, dengan terbuktinya hipotesis tersebut maka variabel sumberdaya dan standar pendidikan tidak memiliki pengaruh yang nyata dengan standar pendidikan, Jadi semakin meningkatnya sumberdaya maka tidak berpengaruh terhadap standar pendidikan begitu juga sebaliknya.

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh, maka akan dilakukan perhitungan koefisien determinasinya sebesar 0.9 sedangkan 99.1 faktor lain seperti proses dan output yang berhubungan namun tidak diteliti. Hal ini menunjukkan variabel sumberdaya dan standar pendidikan hanya salah satu dari sekian banyak variabel yang memiliki pengaruh dengan standar pendidikan.

E. Kesimpulan

1. Untuk membuat suatu kebijakan seharusnya mempertimbangkan sumber daya yang ada baik itu finansial, kewenangan, sumber daya manusia, dan potensi yang ada secara menyeluruh agar di saat berjalanya kebijakan itu tidak terjadi hambatan ataupun menimbulkan masalah baru.

2. Pendidikan terlalu terfokus pada *input* (berapa siswa yang bersekolah) dan *output* (berapa siswa yang lulus ujian nasional dan seberapa banyak prestasi siswa) tanpa melihat apakah ada pengaruh terhadap standar yang ada. Kedepan, perlu fokus itu lebih pada pelaksanaan (proses) pendidikan di sekolah, tentang bagaimana pembelajaran dilaksanakan, media pembelajaran, dan ketersediaan sumber belajar bagi siswa. Sekaligus sejauhmana kompetensi guru dan tenaga pengajar lainnya beserta alat evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan sekolah.

F. Referensi

- Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh. 2003. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang : JP Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana.
- Faisal, Sanapiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- P.Lester, James & Joseph Steward Jr. 2002. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wibowo. 1980. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta : Media Pressindo.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Haris Munandar
NIM / Periode lulus : E01108109 / 14 Februari 2013
Fakultas/Jurusan : ISIP / IA
E-mail address/HP : Harismunandar964@gmail.com / 085352430179

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENGARUH KEBIJAKAN KUOTA 95% TERHADAP STANDAR PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Fidi, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 8 April 2013

Aladin
(Haris Munandar)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).